

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa LSM New Padoe Jiwa, sebagai salah satu bentuk interest group yang bergerak di bidang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Bukittinggi, secara teoritis telah memenuhi ketiga peran utama sebagaimana dikemukakan oleh Nazneen Kanji dan David Lewis. Kendati demikian, dalam perkembangannya, LSM New Padoe Jiwa menghadapi sejumlah kendala struktural dan fungsional yang berpengaruh terhadap keberlangsungan perannya. Salah satu hambatan utama adalah terkendalanya aspek pendanaan dan terbatasnya relasi kelembagaan, yang terjadi setelah terhentinya program pemerintah pusat melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) serta tidak adanya tindak lanjut dari hasil audiensi yang dilakukan dengan pemerintah daerah.

Penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan LSM New Paode Jiwa pada satu sumber pendanaan utama, yakni hibah pemerintah, berdampak pada lemahnya keberlanjutan operasional organisasi. Upaya penggalangan dana internal dan hibah kegiatan telah dilakukan, namun belum mampu menopang kebutuhan lembaga secara berkelanjutan. Selain persoalan pendanaan, aspek legalitas dan legitimasi juga berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan LSM New Paode Jiwa. Tidak diperpanjangnya status keaktifan lembaga di Badan Kesbangpol berdampak pada menurunnya pengakuan formal dan sosial, sehingga

membatasi akses lembaga dan menjalin ketiraan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya finansial, legalitas, dan legitimasi saling berkaitan dan secara bersama-sama menentukan kemampuan LSM dalam menjalankan perannya khususnya peran sebagai *Implementer* secara berkelanjutan di ruang masyarakat sipil.

Disisi lain, kondisi ini juga mencerminkan dinamika peran LSM dalam konteks relasi antara masyarakat sipil dan negara, dimana dukungan structural dari pemerintah dapat secara signifikan memengaruhi tingkat efektivitas dan keberlanjutan peran lembaga swadaya masyarakat di tingkat lokal. Fenomena ini menandakan bahwasannya kurangnya peduli dan fokus pemerintah daerah terkait isu penyalagunaan narkoba di Kota Bukittinggi dalam dua periode terakhir, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Kota Bukittinggi masih tercatat sebagai wilayah hukum Polres tertinggi ke dua di Sumatera Barat.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini memperlihatkan bagaimana peran LSM New Padoe Jiwa di Kota Bukittinggi dianalisis menggunakan teori peran NGO oleh Nazneen Kanji dan David Lewis dengan indikator *implementer*, *catalyst*, dan *partner* serta permasalahan yang dihadapi lembaga dilapangan. Peneliti menemukan bahwasannya masih terdapat kesenjangan antara konsep teoritis dengan realitas di lapangan, terutama pada indikator *Implementer* dan *Partner* terkait keberlanjutan program rehabilitasi sosial dan keterbatasan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian berikutnya sebaiknya memperdalam pengkajian

informasi terkait LSM New Padoe Jiwa secara historikal serta memperdalam aspek hubungan kelembagaan antara LSM, pemerintah, dan aktor masyarakat sipil lainnya, sehingga dapat memperkaya literature tentang kolaborasi multi aktor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik itu bagi peneliti kedepannya maupun pemerintah.

6.2.2. Saran Praktis

Secara praktis, LSM New Padoe Jiwa perlu memperkuat kembali eksistensinya di tengah masyarakat, terutama setelah terhentinya program rehabilitasi dalam lima tahun terakhir. Upaya ini dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali program pemberdayaan dan wajib lapor, memperluas jaringan kerasama dengan instansi kesehatan, kepolisian, dan BNN Provinsi, serta memanfaatkan media digital sebagai saran edukasi publik. Terkait anggaran, LSM New Padoe Jiwa diharapkan dapat mengerakkan sumber daya yang ada dalam mengelola dan memperoleh anggaran seperti berkolaborasi dengan lembaga internasional, bekerjasama dengan pihak swasta (filantrop), atau mengembangkan unit usaha secara mandiri sebagai salah satu strategi keberlanjutan organisasi, sehingga roda keuangan lembaga tetap berjalan tanpa bergantung pada pihak eksternal. Langkah ini juga berperan penting dalam menjaga independensi LSM New Padoe Jiwa sebagai bagian dari infrastruktur politik dan sistem negara.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih peduli dan memberikan perhatian lebih terhadap isu penyalahgunaan narkoba di Kota Bukittinggi dengan cara memberikan dukungan terhadap LSM New Padoe Jiwa sebagai bentuk apresiasi terhadap eksistensi NGO dalam membantu pelaksanaan program pemerintah seperti regulasi, dukungan anggaran yang lebih berkelanjutan, atau

dalam bentuk mobilitas dan akses terhadap instansi lain baik dalam lingkup lokal hingga nasional. Selain itu masyarakat setempat perlu dilibatkan secara lebih aktif, baik melalui kaderisasi relawan, tokoh masyarakat, maupun forum bersama, sehingga strategi pencegahan dan penanggulangan narkoba bersifat kolektif, berkesinambungan dan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat. Karena, peneliti sangat menyayangkan bahwasanya terdapat LSM yang masih peduli terhadap hak kelompok yang termarginalkan harus terhenti ditengah jalan akibat hal yang seharusnya masih bisa diperjuangkan.

